

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pemberhentian perangkat nagari oleh Penjabat Wali Nagari Sungai Aua dalam perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Nagari, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberhentian perangkat nagari yang dilakukan oleh Penjabat Wali Nagari Sungai Aua tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Nagari. Prosedur pemberhentian yang seharusnya mengedepankan asas musyawarah, transparansi, dan keadilan tidak dilaksanakan secara optimal.
2. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, tindakan pemberhentian tersebut mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan kewenangan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam Islam, yang menuntut adanya keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*syura*), serta penghormatan terhadap aturan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pj Wali Nagari dan Pemerintah Daerah, agar lebih memahami dan mematuhi ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Nagari. Pemberhentian perangkat nagari harus dilakukan melalui mekanisme yang legal, akuntabel, dan berlandaskan musyawarah dengan melibatkan semua pihak yang terkait.

2. Masyarakat Nagari, diharapkan lebih aktif dalam melakukan kontrol sosial dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan nagari dengan dilakukannya sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan kepada seluruh pemangku kebijakan di tingkat nagari maupun masyarakat nagari mengenai prinsip-prinsip dasar pemerintahan Islam dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan dapat dilakukan secara adil, terbuka, dan partisipatif, serta mencerminkan nilai-nilai etis dalam Islam, agar menghindari terjadinya pembenaran bagi tindakan sepihak dari pihak pemerintah nagari



DAFTAR PUSTAKA

- A, A. E. (2016). Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang – undangan Dalam Perspektif Politik Hukum. *urnal Hukum Vol. 10 Nomor 4*, 608.
- Agostiono. (2010). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*. Jakarta: Rajawali Press.
- Amaliatulwalidain. (2016). DEMOKRASI LOKAL DI SUMATERA BARAT Memahami Pendekatan "Self Governing Community" pada Sistem Pemerintahan Nagari modern di Minangkabau. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Volume 2 nomor 1*.
- Badan Pusat Statistik. (2025, Agustus 1). Diambil kembali dari BPS Pasaman Barat: <https://pasamanbaratkab.bps.go.id/indicator/16/160/1/sejarah.html>
- Daerah Otonom . (t.thn.). Diambil kembali dari WikipediA Ensiklopedia Bebas : https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah#Asas
- Djazuli, A. (2013). *Fiqh Siyasah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, H. (2017). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dan Rambu rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Fattah, N. (2008). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Feis, I. (2009). Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria. *Gema Eksos*, 66.
- Gaffar, A. (2009). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar Kedasama.
- Gukguk, E. R. (2012). *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Halim, A. (2013). *Relasi Islam, Politik, Dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS.
- Hariyanto. (2000). *Belajar dan Pembelajaran sebuah Teori dan Konsep Dasar*. Bandung : PT. Remaja Rosdarkarya.
- HR, R. (2007). *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* . Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Prenadamedia Group.

- Ishaq. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jindan, K. I. (1995). *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Lubis, M. S. (2014). *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Manan, B. (1995). *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung : Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung.
- Manan, B. (1995). *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung : Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung.
- Momanto, N. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw li Kecamatan Sinonsayang. *Jurnal Eksekutif*, 3.
- Ndraha, T. (1991). *Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prakoso, D. (1985). *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prakoso, D. (1985). *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pulungan, S. (2014). *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak.
- Quthb, S. (2001). *Tafsir fi Zhilalil Qu'an*. Jakarta: Gema Insani.
- Rahayu, A. S. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rauf, H. R. (2018). *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantunya)*. Riau: NusaMedia Yogyakarta.
- Ridwan. (2020). *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Amzah.
- Sugiana, P. M. (2012). *mplementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suhardiman. (2025, Agustus 1). *Produksi Ikan di Pasaman Barat*. Diambil kembali dari Suara Sumbar: SuaraSumbar.id

- Sulpandri. (2015, juli 4). Diambil kembali dari wordPress.com: <https://sulpandrInstitut.wordpress.com/2015/07/04/mengenal-nagari-dan-kecamatan-sungai-aur-kabupaten-pasaman-barat-sumatera-barat/>
- Suryadi, B. (2016). *Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa*. Bandar Lampung: Sai Wawai.
- Suryadi, B. (2016). *Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa*. Bandar Lampung : Sai Wawai.
- Trijono, R. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Usman, H. (2006). *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Widodo, J. (2012). *Analisis Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public*. Malang : Bayumedia Publisher.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakrta: Prenada Media Group.
- Zakir, F. (2021). MENGENAL SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATERA BARAT. *Ensiklopedia of Journal*, 55.